

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengendalian Intern

Pada perusahaan yang memiliki perkembangan yang baik dalam ukuran maupun dalam operasinya, pimpinan perusahaan tidak akan mungkin lagi untuk mengawasi setiap tahap dalam kegiatan operasi. Keadaan ini mendorong pimpinan untuk melimpahkan sebagian wewenangnya kepada manajer bagian agar dapat membantu sebagian wewenangnya dan membantu melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun, dalam proses pelimpahan wewenang tersebut, manajer bagian tetap harus mendapatkan pengawasan dari manajer puncak agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan yang telah diberikan.

2.1.1.1 Pengertian Pengendalian Intern

Pengertian pengendalian intern telah mengalami perubahan dalam konsep serta pemikirannya. Perubahan konsep tersebut terjadi seiring dengan semakin kompleksnya perkembangan dunia bisnis dari hari ke hari. Pada awalnya, pengendalian intern mempunyai arti yang sempit yaitu hanya merupakan internal cek. Internal cek merupakan konsep kesamaan hasil melalui pencocokan catatan dan dua bagian atau lebih.

Dengan metode tersebut, internal cek sudah sangat tidak memadai karena terjadinya perkembangan dalam perusahaan. Karena internal cek hanya mengembangkan pengendalian melalui kebenaran angka-angka tanpa melihat aspek-aspek lain yang mungkin juga mengalami penyimpangan di luar angka-

angka tersebut misalnya seperti kolusi atau penyalahgunaan jabatan. Karena perilaku seseorang tidak dapat dinilai hanya dengan perbandingan angka-angka, maka terjadilah perubahan konsep dalam cek internal menjadi sistem pengendalian internal.

Menurut Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) dalam Cangemi (2003:69) memberikan definisi dari pengendalian intern adalah:

“Internal control is a process, affected by an entity’s board of directors, management and other personal, designed to provide reasonable assurance regarding to the achievement of objectives in the following categories: (1)the effectiveness and efficiency of operations, (2)the reliability of financial reporting and (3) the compliance with applicable law and regulations”

Dari pernyataan tersebut, dijelaskan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses dan aktivitas operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari proses manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Pengendalian intern merupakan bagian integral dari proses manajemen. Karena konsep dasar dari pengendalian intern meliputi : (1) berbagai kegiatan, (2) dipengaruhi oleh manusia, (3) diharapkan dapat mencapai tujuan.

Sedangkan pengertian pengendalian intern menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) (dalam Bambang Hartadi, 1999: 3), adalah sebagai berikut:

‘Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan.’

Selanjutnya, Mulyadi (2002:180) menjelaskan bahwa :

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen/personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan: (1) Keandalan pelaporan keuangan (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (3) efektivitas dan efisiensi operasi.”

Pengendalian intern berdasarkan PSA No. 69 paragraf 06 Per 1 Januari 2001 (IAI, SPAP: 319.2), adalah sebagai berikut:

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas – yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi operasi serta mendorong untuk ditaatinya kebijakan-kebijakan manajemen.

Untuk memberikan kerangka atau struktur yang dipertimbangkan oleh banyak pengendalian intern dalam upaya pencapaian tujuan satuan usaha, menurut COSO dalam Cangemi (2003:73) dirumuskan lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan sebagai berikut: (1) lingkungan pengendalian (2) perhitungan resiko (3) informasi dan komunikasi (4) aktivitas pengendalian (5) monitoring.

2.1.1.2 Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan pengendalian intern tentunya tidak terlepas dari pengertian pengendalian intern itu sendiri seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Arens (2005:289) menyatakan tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut :

1. *to provide reliable data;*
2. *to safeguards assets and records*
3. *to promote operational efficiency*
4. *to encourage adherence to prescribe policies*

Untuk lebih menjelaskan tujuan pengendalian intern, akan diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Menyediakan data yang dapat dipercaya

Manajemen harus memiliki informasi yang akurat dalam pelaksanaan tugasnya. Informasi yang akurat ini diperoleh dari pengolahan data yang handal. Informasi yang akurat ini sangat penting sebagai dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

2. Menjaga keamanan harta dan catatan perusahaan

Setiap catatan perusahaan dan harta yang dimiliki perusahaan harus mendapatkan perlindungan yang layak dari kemungkinan terjadinya kerusakan atau pencurian. Oleh karena itu, untuk menjaga harta dan catatan perusahaan maka dilindungi dengan melaksanakan pengendalian intern yang memadai.

Karena dengan pengendalian intern yang memadai akan tercipta ketertiban dalam menjaga harta dan *asset* perusahaan.

3. Untuk meningkatkan efisiensi perusahaan

Pengendalian intern diharapkan dapat menghindarkan terjadinya pemborosan dan *inefisiensi* sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Dengan demikian apabila pengendalian intern suatu perusahaan telah didesain dan berjalan dengan baik, maka akan sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya sumber daya yang tidak efisien.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan

Struktur pengendalian intern bertujuan untuk memastikan segala peraturan, kebijakan serta prosedur telah ditaati oleh karyawan perusahaan.

Sawyer (2005:131) menjelaskan kategori umum dari pengendalian intern adalah:

1. Tujuan Operasional.

Hal ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas termasuk kinerja dan tujuan profitabilitas dan pengamanan sumber daya terhadap kerugian. Tujuan-tujuan tersebut bervariasi berdasarkan pilihan manajemen mengenai struktur dan kinerja.

2. Tujuan Pelaporan keuangan.

Hal ini berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang handal termasuk pencegahan pelaporan keuangan publik yang mengandung kecurangan. Tujuan tersebut terutama diarahkan oleh persyaratan-persyaratan eksternal

3. Tujuan-tujuan ketaatan.

Tujuan ini berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku bagi entitas. Tujuan-tujuan tersebut tergantung pada faktor-faktor eksternal, seperti peraturan lingkungan, dan cenderung sama untuk semua entitas dalam beberapa kasus dan beberapa industri.

Berdasarkan kepada tujuan-tujuan yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern dirancang sebagai salah satu cara guna mengamankan harta kekayaan perusahaan, menciptakan aktivitas perusahaan yang efektif dan efisien serta mencegah terjadinya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan.

Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka pengendalian intern harus disusun dengan matang dan mempertimbangkan berbagai aspek. Selain proses penyusunan yang harus tepat, pengendalian intern juga harus dilakukan dengan efektif.

2.1.1.3 Komponen Pengendalian Intern

Arens (2005:294) mengemukakan elemen pengendalian adalah sebagai berikut: *"... a company's internal control include five categories of policies and procedures that management design and implement to provide reasonable assurance that management's control objective will be met. These are called the components of internal control are, (1) the control environment, (2) management risk assessment, (3) information and communication, (4) control activities, and (5) monitoring."*

Komponen pengendalian intern menurut COSO report's tersebut dalam Cangemi (2003:69) tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. *The control environment* (lingkungan pengendalian)

Inti dari pengendalian intern yang efektif adalah terletak pada cara pandang manajemen terhadap pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan cara pandang manajemen mengenai pentingnya pengendalian. Dalam lingkungan pengendalian terdiri dari tujuh bagian, yaitu : (1) *Integrity and Ethical values* ; (2) *Commitment to competence* ; (3) *Management's philosophy and operating style* ; (4) *Organizational Structure* ; (5) *Board of directors or audit committee* ; (6) *Assignment of authority and responsibility* ; (7) *Human resources policies and practices*.

Ketujuh bagian pada lingkungan pengendalian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

a. *Integrity and Ethical values* (Nilai Integritas dan Etika)

Menurut Al Haryono Yusuf (2001:257) untuk menekankan pentingnya integritas dan nilai etika diantara para personil suatu organisasi manajemen puncak harus:

- Menciptakan iklim dengan memberi contoh, yaitu dengan menunjukkan integritas dan berperilaku dengan standar etika yang tinggi;
- Mengkomunikasikan kepada semua karyawan, secara lisan dan melalui kebijakan serta aturan-aturan perilaku tertulis, bahwa semua karyawan mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan tentang semua pelanggaran yang diketahuinya atau dicurigainya kepada atasannya, bahwa pelanggaran dapat dikenai hukuman;
- Memberi pedoman moral kepada karyawan yang karena latar belakang moralnya yang buruk, membuat mereka tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk;
- Mengurangi atau menghilangkan dorongan atau godaan yang membuat orang (karyawan) menjadi tidak jujur, melanggar hukum dan bertindak tidak etis.

b. *Commitment to competence* (Komitmen Terhadap Kompetensi)

Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen tentang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dan perpaduan antara intelegensia, keterampilan, dan pengalaman yang diminta untuk pengembangan kompetensi. Sehingga kompetensi yang dimiliki karyawan harus sesuai dengan tanggung jawab yang akan dipikulnya.

c. *Management's philosophy and operating style* (Filosofi Dan Gaya Operasi Manajemen)

Banyak karakteristik yang membentuk falsafah manajemen dan gaya operasinya dan memiliki dampak terhadap lingkungan pengendalian. Karakteristik tersebut meliputi apa yang dilakukan atau dimiliki manajemen dalam:

- Pendekatan dalam mengambil dan memonitor resiko bisnis;
- Kebiasaan dan tindakan terhadap pelaporan keuangan;
- Pemilihan prinsip akuntansi alternatif yang tersedia secara konservatif dan agresif;
- Kebiasaan dalam mengolah informasi dan fungsi akuntansi secara personalia.

d. *Organizational Structure* (Struktur Organisasi)

Struktur organisasi menyangkut perumusan kewenangan dan tanggung jawab serta alur pelaporan. Auditor perlu memahami hubungan tersebut agar dapat menilai lingkungan pengendalian pada perusahaan klien dan bagaimana lingkungan tersebut berdampak terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian.

e. *Board of directors or audit committee* (Dewan Komisaris dan Komite Audit)

Komposisi dewan komisaris dan komite audit serta bagaimana mereka melakukan tanggung jawab memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan pengendalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dewan komisaris dan komite audit meliputi indenpendensi mereka yang berkaitan dengan proporsi anggota dewan yang berasal dari luar, pengalaman serta tingginya kedudukan mereka, seberapa jauh keterlibatan dan ketajaman pengamatan atas aktivitas manajemen dan sifat serta luasnya interaksi dengan auditor baik intern maupun ekstern.

f. *Assignment of authority and responsibility* (Pembagian Wewenang dan Tanggung Jawab)

Perumusan kewenangan dan tanggung jawab merupakan lanjutan dari pengembangan struktur organisasi. Hal ini menyangkut tentang bagaimana dan kepada siapa kewenangan tanggung jawab diberikan. Adanya perumusan kewenangan dan tanggung jawab akan membuat setiap individu mengetahui (1) bagaimana tindakannya berkaitan dengan pihak lain dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan, dan (2) untuk hal apa masing-masing individu harus bertanggung jawab.

g. *Human resources policies and practices*. (Kebijakan dan Praktei Sumber Daya Manusia)

Salah satu konsep dasar pengendalian intern yang telah dibahas adalah bahwa pengendalian intern dipengaruhi dan dilaksanakan oleh manusia. Karena itu keefektifan pengendalian intern akan sangat bergantung pada kebijakan dan praktik tentang sumber daya yang dianut.

2. *Management risk assessment* (Manajemen penaksiran resiko)

Setiap organisasi mempunyai tingkat resiko yang berbeda yang harus dikendalikan untuk tercapainya tujuan perusahaan. Manajemen harus mengidentifikasi berbagai resiko agar mencapai tingkat resiko yang minimal. Penaksiran resiko timbul adalah penilaian dan analisis manajemen terhadap resiko yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar sesuai dengan standar laporan keuangan yang berlaku. Mananjemen penilaian resiko merupakan bagian desain dan pelaksanaan pengendalian intern untuk meminimalkan kesalahan.

3. *Information and Communication* (Informasi dan komunikasi)

Tujuan sistem informasi dan komunikasi suatu perusahaan adalah untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan hutang entitas tersebut. Komponen kunci dalam pengendalian internal adalah arus komunikasi internal yang ada dalam perusahaan. Pada organisasi yang sehat, arus informasi berjalan keseluruhan. Sistem informasi harus menghasilkan alur audit atau alur transaksi yang

lengkap. Alur transaksi adalah rangkaian bukti yang diperoleh dengan pengkodean, referensi silang, dan pendokumentasian yang menghubungkan saldo rekening dengan data asli transaksi. Komunikasi berarti meyakinkan bahwa personil yang terlibat dalam sistem pelaporan keuangan mengerti bagaimana kegiatan yang dilakukannya berkaitan dengan pekerjaan orang lain.

4. *Control Activities* (aktivitas pengendalian)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, selain dari empat komponen lain yang diperlukan apabila didalamnya diidentifikasi adanya resiko untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk dapat berhasil dalam mengendalikan risiko dan mencapai tujuan organisasi maka manajemen harus menerapkan kegiatan pengendalian yang diantaranya:

- a. *Adequate separations of duties* (pemisahan tugas yang layak);
- b. *Proper authorization of transactions and activities* (otorisasi yang layak);
- c. *Adequate documents and records* (dokumen dan catatan yang layak);
- d. *Physical control over assets and records* (pengendalian fisik);
- e. *Independent checks on performance* (pengecekan secara bebas).

5. *Monitoring* (pengawasan)

Monitoring adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang masa. Hal itu, menyangkut penilaian tentang rancangan dan pelaksanaan operasi pengendalian oleh orang yang tepat untuk setiap periode tertentu, untuk menentukan bahwa pengendalian intern telah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan bahwa modifikasi yang diperlukan karena adanya perubahan-perubahan kondisi telah dilakukan.

2.1.1.4 Keterbatasan Pengendalian Intern

Walaupun pengendalian intern telah disusun dan diselenggarakan secara memadai dapat saja dianggap tidak sepenuhnya efektif, karena pada dasarnya pengendalian intern tidak dapat menjamin sepenuhnya tercapai tujuan organisasi. Faktor-faktor yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan organisasi antara lain adalah *management oversides* (kegagalan manajemen) dan *Internal control verse benefit* (internal kontrol berlawanan dengan keuntungan).

Sedangkan keterbatasan pengendalian intern yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2001:319) adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan manusia dalam mengambil keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi,

seperti kekeliruan atas kesalahan yang sifat sederhana. Disamping itu, pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi diantara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern.

2. Biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut.
3. Adat-istiadat, kultur dan *Coorporate Governance System* dapat mencegah ketidakberesan yang dilakukan oleh manajemen.

Menurut Mulyadi (2002:181), “keterbatasan bawaan yang dimiliki oleh pengendalian intern adalah Kesalahan dalam pertimbangan; Gangguan; Kolusi; Pengabaian oleh manajemen; Biaya lawan manfaat.”. Untuk lebih jelas, kelima keterbatasan sistem pengendalian intern tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam Pertimbangan

Seringkali dalam pengambilan keputusan manajemen maupun pihak terkait lainnya melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Kesalahan dalam pertimbangan ini diakibatkan oleh kurangnya informasi yang dapat menjadi sumber acuan bagi manajemen.

2. Gangguan

Gangguan yang dimaksud adalah adanya perbedaan persepsi antara manajemen atas dengan karyawan di lapangan sehingga membuat terganggunya aktivitas perusahaan tersebut. Gangguan ini diakibatkan terjadinya pergantian karyawan atau perubahan sistem yang dilakukan.

3. Kolusi

Kolusi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak intern yang menyebabkan kerugian bagi pihak perusahaan tersebut. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat

menyebabkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan perusahaan dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang. Pengendalian intern berusaha agar kolusi dapat dihindari dengan cara giliran bertugas, larangan bertugas oleh mereka yang mempunyai hubungan kekeliruan dan sebagainya. Tetapi pengendalian intern tidak menjamin bahwa kolusi tidak terjadi.

4. Pengabaian Oleh Manajemen

Kurangnya rasa memiliki terhadap perusahaan atau rasa jenuh akan membuat seseorang mengabaikan keputusan yang telah dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah, seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu. Contohnya adalah manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah sebenarnya untuk mendapatkan bonus lebih tinggi bagi dirinya atau untuk menutupi ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Biaya lawan Manfaat

Biaya lawan manfaat yang artinya adalah biaya dalam membentuk suatu sistem pengendalian intern oleh perusahaan tidak boleh lebih besar daripada manfaat yang akan diperoleh perusahaan. Memang tidak akan diketahui besaran yang pasti dari manfaat yang akan diperoleh dari aktivitas pengembangan sistem pengendalian intern, namun manajemen bertugas untuk memperkirakan nilai yang wajar dan mendekati sehiungga tidak terjadi ketimpangan dalam biaya.

2.1.2 Efisiensi

Efisiensi merupakan kriteria yang biasa digunakan dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Dalam mengelola setiap harta perusahaan, maka perusahaan mengupayakan agar setiap aktivitas yang dijalankannya dapat berlangsung dengan efisien.

Pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh Arens, Alder dan Beasley (2003:738) adalah “*Efficiency refers to resources to achieved those objectives.*” Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa efisiensi lebih menekankan pada perbandingan antara sumber dan hasil yang dicapai.

Sedangkan pengertian efisiensi yang dikemukakan oleh Maman Ukas (2004:100), efisiensi yaitu: “melakukan sesuatu dengan tepat (*doing the things right*) dalam hal ini manajer dituntut untuk memfokuskan pekerjaannya pada upaya untuk meminimalisasikan biaya, sumberday yang lain yang dipergunakannya dan mencapai hasil yang tinggi.”

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa efisiensi lebih menitikberatkan pada upaya untuk meminimalisasikan keseluruhan sumber daya yang ada pada perusahaan dalam mencapai hasil yang diharapkan..

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, efisiensi menitikberatkan pada kemampuan dan kehematan organisasi dari dua sisi. Yaitu kemampuan organisasi untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan menggunakan sumberdaya yang lebih sedikit atau sebaliknya.

2.1.3 Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Dalam Rachmat Firdaus (2004:1) dikemukakan beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian/defenisi/batasan tentang kredit yaitu sebagai berikut:

1. *“Credit is the personal reputation a person has, in consequence of which he can buy money or goods or labor, by giving in exchange for them, a promise to pay at a future time”* (Mac Leod).
(Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia dapat memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya pada waktu yang akan datang).
2. *“The transfer of something valuable to another, whether money, goods or service in the confidence that he will be both willing and able, at a future day, to pay its equivalent”*(Tucker)
(Pertukaran/pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik ini berupa uang, barang maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama di masa yang akan datang).
3. *“In general sense credit is based on confidence in the debtors ability to make a money payment at some future time”*. (Rolling G. Thomas)
(Dalam pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang).
4. “Kredit: sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam” (Ensiklopedia Umum).
5. “.....bahwa kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi suatu waktu di hari yang akan datang....” (Drs. Amir Rajab Batubara)
6. Menurut Undang-undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11): Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian bank menurut Undang-undang No.10/1998: Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas dapat diketahui banyak pengertian mengenai kredit yang kemudian dapat memberikan persepsi yang berbeda.

Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Tetapi pada dasarnya pegangan yang baik adalah definisi menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No.7/1992 Tentang Perbankan. Dari pengertian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kredit, pihak kreditur (bank atau kreditur lainnya) menyediakan prestasi (uang atau barang) dengan pihak lain yang akan memperoleh kontra prestasi pada waktu yang akan datang sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas walaupun titik beratnya berbeda-beda namun kiranya dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.
2. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjamkan uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.

3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur-unsur perbedaan waktu seperti di atas, di mana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti. Maka pada dasarnya kredit itu mengandung resiko. Resiko tersebut berasal dari macam-macam sumber, termasuk di dalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

2.1.3.2 Fungsi Kredit

Fungsi kredit dewasa ini pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang semuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup orang banyak.

Adapun fungsi kredit menurut Rachmat Firdaus (2004:5) adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa. Andai kata suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayar, maka dengan adanya kredit, pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*. Sebagaimana dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang pendapatannya berlebihan ($Y > E$) dan golongan yang kekurangan ($Y < E$) maka dari golongan yang berlebih ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan (*idle*). Dana yang *idle* tersebut jika

dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah menjadi dana yang efektif. Dengan demikian terjadi pemindahan daya beli yang telah ada dari golongan satu ke golongan lain.

3. Kredit sebagai alat pengendalian harga. Dalam hal ini andai kata diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka salah satu caranya dengan jalan mempermudah dan mempermudah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat. Dalam keadaan sebaliknya yaitu andai kata diperlukan untuk mempersempit jumlah uang yang beredar maka diusahakan adanya pembatasan pemberian kredit dengan suatu pagu (*ceiling* atau *plafond*) kredit tertentu.
4. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi yang ada. Dengan adanya bantuan permodalan yang berupa kredit, maka seorang pengusaha baik industriawan, petani dan lain sebagainya bisa memproduksi atau meningkatkan produksi dari potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya. Misalnya seorang industriawan akan dapat mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, petani akan dapat membiayai pengelolaan tanahnya sehingga akan menghasilkan berbagai hasil pertanian.

Dengan kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan maka diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kredit tersebut untuk memajukan usaha bahkan untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat itu sendiri.

2.1.3.3 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Jadi dapat dikatakan bahwa kepercayaan merupakan suatu unsur yang tidak lepas daripada kredit. Kredit menurut Suyatno (1999;4) memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pihak kreditur bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi tenaga kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. Tingkat Resiko, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari, semakin lama kredit diberikan semakin tinggi tingkat resikonya.

4. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi dapat juga berbentuk barang dan jasa.

2.1.3.5 Penyaluran Kredit

Kredit yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Sehingga hal ini menyebabkan banyak perusahaan pembiayaan berlomba-lomba meningkatkan penyaluran kreditnya.

Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana perusahaan pembiayaan. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit mencapai 70%-80% dari volume usaha perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu sumber utama pendapatan perusahaan pembiayaan berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga, sebagaimana diungkapkan Dahlan Siamat (2004:165).

Perencanaan penyaluran kredit harus dilakukan secara realistis dan objektif agar pengendalian dapat berfungsi dan tujuan tercapai. Perencanaan penyaluran kredit harus didasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber, dan jangka waktu dana agar tidak menimbulkan masalah kepada tingkat kesehatan dan likuiditas perusahaan pembiayaan. Jelasnya, rencana penyaluran kredit harus seimbang dengan perencanaan secara baik dan benar. Dalam rencana penyaluran kredit ini harus ada pedoman tentang prosedur, alokasi, dan kebijaksanaannya.

Prosedur penyaluran kredit menjadi tugas dan tanggung jawab atau *job description* dari departemen (bagian) pemasaran suatu perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu sangat diperlukan karyawan yang memadai dan profesional dalam bagian kredit. Menurut Malayu Hasibuan (2006:91) syarat-syarat karyawan bagian kredit adalah sebagai berikut:

1. Jujur dan bermoral baik, serta ahli di bidang perkreditan.
2. Adil dalam memberikan pelayanan terhadap semua nasabah bank.
3. Mengetahui hukum-hukum perjanjian dan perikatan agunan kredit.
4. Mengetahui syarat-syarat agunan yang boleh diterima.
5. Objektif dalam penilaian agunan kredit yang diberikan nasabah.
6. Berpengetahuan luas tentang nilai ekonomis agunan kredit.
7. Mengetahui ketetapan dan surat edaran Bank Indonesia tentang perkreditan.
8. Mentaati peraturan dan prosedur penyaluran kredit.

Adapun prosedur penyaluran kredit menurut Malayu Hasibuan (2006:91) adalah sebagai berikut:

1. Calon debitur menulis nama, alamat, agunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit.
2. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan.
3. Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C, 7P, dan 3R dari permohonan kredit tersebut.
4. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau *Legal Lending Limit* (L3) atau BMPK-nya.
5. Jika BMPK-nya disetujui nasabah, akad kredit (Perjanjian kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dalam penyaluran kredit diharapkan sesuai dengan aturan. Alokasi penyaluran kredit harus berpedoman pada ketetapan dan surat edaran otoritas moneter dan Bank Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik bank atau lembaga penyaluran kredit (pemegang saham) mendapatkan maksimal 20% dari jumlah kredit yang disalurkan lembaga bersangkutan.

2. KUK/KUT mendapatkan minimal 20% dari jumlah kredit yang disalurkan bank.
3. Masyarakat luas (di luar 1 dan 2) sebanyak 60% dari jumlah kredit yang diberikan, disalurkan kepada sektor-sektor perekonomian seperti sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan.
4. Kredit rekening Koran dan kredit berjangka.

2.1.3.6 Prinsip Penyaluran Kredit

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada perusahaan pembiayaan hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk mendapatkan kredit, maka fungsi jaminan kredit adalah hanya untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu dalam pemberian kreditnya perusahaan pembiayaan harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar.

Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka perlu dilakukan penilaian kepada debitur agar meyakinkan pihak perusahaan pembiayaan bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.

Ada beberapa prinsip yang sering dilakukan dalam penyaluran kredit yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, prinsip 3R (Kashmir 2003:117-120). Adapun prinsip-prinsip tersebut yang terkandung dengan analisis 5C sebagai berikut:

1. *Character* (karakter)

Pengertian karakter adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat

atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah yang baik bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup, keadaan keluarga, hobi dan sosial. Karakter merupakan ukuran menilai "kemauan" nasabah dalam membayar kredit. Orang yang memiliki karakter yang baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2. *Capacity (Capability)*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya mengembalikan kredit.

3. *Capital*

Setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin. Fungsi dari jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition of economy*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor-sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. *Personality* (Kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party* (Pengelompokkan)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari pihak bank.

3. *Purpose* (Tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau tujuan produktif atau tujuan perdagangan.

4. *Prospect* (Prospek)

Yaitu mengetahui usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya perusahaan yang akan rugi tetapi juga nasabah.

5. *Payment* (Cara Pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi maka akan ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability* (Keuntungan)

Untuk menganalisis bagaimana nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan adanya tambahan kredit yang diterima dari perusahaan pembiayaan.

7. *Protection* (Perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh perusahaan pembiayaan namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Sedangkan penjelasan mengenai penilaian dengan prinsip 3 R (Hardiwidjaja dan Rivai Wirasasmita 2000:34-39) adalah sebagai berikut:

1. *Return (hasil yang dicapai)*

Return di sini berarti penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur dibantu dengan kredit oleh perusahaan pembiayaan. Return di sini juga dapat diartikan sebagai keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan pembiayaan apabila memberikan kredit kepada pemohon.

2. *Repayment (pembayaran kembali)*

Perusahaan pembiayaan harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) dan apakah kredit harus diangsur/dicicil atau dilunasi di akhir periode.

3. *Risk bearing ability*

Perusahaan pembiayaan harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung resiko kegagalan andai kata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

2.1.3.7 Prosedur Pemberian Kredit

Thomas Suyatno (1999;62), mengemukakan bahwa “prosedur umum mengenai pemberian kredit adalah sebagai berikut: tahap permohonan kredit, tahap penyidikan dan analisis kredit, tahap keputusan atas permohonan kredit, tahap pencairan fasilitas kredit dan tahap pelunasan fasilitas kredit.” Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur pemberian kredit akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Permohonan Kredit

Tahap permohonan kredit merupakan tahapan bagi para nasabah untuk mengajukan permohonan kredit sesuai dengan yang mereka perlukan. Tahapan ini

mencakup permohonan baru untuk mendapat fasilitas kredit, permohonan tambahan untuk fasilitas kredit yang sudah berjalan serta bisa juga permohonan perubahan syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan. Pada tahap ini, perusahaan memberitahukan syarat yang berlaku atas suatu kredit yang diajukan oleh debitur.

2. Tahap Penyidikan Dan Analisis Kredit

Tahap penyidikan dan analisis kredit merupakan tahap dimana perusahaan mengumpulkan segala informasi yang berhubungan dengan debiturnya. Penyidikan dilakukan atas prinsip-prinsip penyaluran kredit. Dari hasil penyidikan tersebut, disusun laporan yang dapat dianalisis untuk diproses lebih lanjut lagi. Proses analisis dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya atau seorang analis kredit. Hasil dari analisis kredit inilah yang dijadikan sebagai dasar dari tahap selanjutnya.

3. Tahap Keputusan Atas Permohonan Kredit

Keputusan atas permohonan kredit adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan fasilitas permohonan kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan yang diambil merupakan hasil pertimbangan dari setiap hasil analisis kredit yang dilakukan oleh analis kredit terhadap prinsip penyaluran kredit.

4. Tahap Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh perusahaan. Pada prakteknya, pencairan fasilitas kredit ini dapat berupa pemindahbukuan atau pencairan secara langsung.

Pencairan fasilitas kredit ini terjadi hanya apabila keputusan atas permohonan fasilitas kredit diterima oleh perusahaan.

5. Tahap Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan fasilitas kredit adalah terpenuhinya setiap kewajiban perkreditan debitur yang mengakibatkan terhapusnya seluruh ikatan perjanjian. Pelunasan fasilitas kredit pada setiap debitur tidaklah sama. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan dari masing-masing perusahaan. Dalam tahap ini, perusahaan bertugas untuk mengingatkan debitur akan tanggal jatuh tempo pembayaran hutangnya. Apabila hingga tanggal yang ditetapkan debitur tidak membayar maka perusahaan dapat memberikan sanksi kepada debitur yang melanggar.

2.1.4 Pengendalian Intern Pemberian Kredit

Azhar Susanto (1999:347-348) mengartikan prinsip-prinsip yang ingin dicapai dalam pengendalian internal pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemisahan fungsi
2. Perlu disusun pencatatan dan pelaporan harian yang baik dan tepat waktu mengenai dana dan posisi kredit.
3. Perlu penyusunan ikhtisar mutasi keuangan bulanan.
4. Perlu mengadakan inventarisasi fisik dalam waktu pendek berikut pengawasan administrasi.
5. Perlu diciptakan peraturan-peraturan intern yang menjamin keamanan atau kelayakan yang bersifat preventif maupun represif.
6. Penandatanganan surat-surat berharga oleh dua orang pejabat berwenang.
7. Perlu disusun surat-surat berharga oleh dua orang pejabat berkas-berkas pembahasan kredit berikut rekening giro dan lain-lain secara baik.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan dalam menciptakan pengendalian intern pemberian kredit diperlukan peran serta dan kerja sama dari berbagai tingkat pegawai dalam perusahaan.

2.1.4.1 Tujuan Pengendalian Intern Pemberian Kredit

Menurut Muljono (1994:483) tujuan pengendalian pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penjagaan atau pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank di bidang perkreditan atas penyelewengan-penyelewengan baik dari oknum-oknum ekstern maupun intern.
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data akuntansi di bidang perkreditan.
3. Untuk meningkatkan efisiensi di dalam pengelolaan dan tata laksana usaha di bidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada.

Berdasarkan tujuan pengendalian pemberian kredit tersebut, apabila kita perhatikan masing-masing tujuannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap tujuan tersebut berkaitan erat satu sama lain. Dengan demikian, maka pelaksanaan pengendalian pemberian kredit mempunyai ruang lingkup yang luas dan tidak hanya untuk mencari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin saja terjadi.

2.1.4.2 Pengaruh Pengendalian Intern Prosedur Pemberian Kredit terhadap

Efisiensi Pemberian Kredit

Perusahaan yang melakukan pengendalian intern yang baik akan menghasilkan manfaat, dimana menurut Arens (2005:289) tujuan Pengendalian Intern adalah:

1. *To provide reliable data;*
2. *To safeguards asset and reports*
3. *To promote operational efficiency*
4. *To encourage adherence to prescribe policies*

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa begitu besarnya manfaat yang dapat diperoleh perusahaan apabila perusahaan tersebut dapat melakukan pengendalian intern yang baik. Informasi yang diteliti tepat waktu, jelas dan dapat

dipercaya adalah sangat berguna bagi dasar pengendalian dan strategi manajemen. Informasi yang seperti itu dapat diperoleh apabila perusahaan melakukan pengendalian intern yang baik.

Manajemen kredit merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang menjual produknya secara kredit, menyangkut pengendalian jumlah kredit, pengendalian pemberian serta pengumpulan piutang secara efisien terhadap kebijaksanaan kredit yang dijalankan oleh perusahaan. Jadi jelas bahwa untuk dapat mencapai manajemen piutang yang baik, perusahaan harus dapat mempunyai pengendalian intern prosedur pemberian kredit.

Pengendalian yang memadai atas kredit pembiayaan dimulai dengan persetujuan kredit oleh pejabat yang berwenang, sesudah peringkat kredit (kelayakan maupun keaktifan pelanggan dalam melunasi hutangnya) dikaji ulang. Begitu juga dengan penyesuaian piutang, seperti adanya *return* dan pengurangan penjualan serta potongan penjualan, juga harus disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab.

Pengaruh pengendalian intern terhadap efisiensi piutang dikemukakan oleh Niswonger (2005:353) adalah prosedur penagihan yang efisien juga harus diterapkan guna memastikan penagihan yang tepat waktunya atas piutang dan untuk meminimalisasikan kerugian dari piutang tak tertagih. Disamping itu penggunaan yang tepat atas perkiraan pengendalian atas perkiraan pengendalian dan buku pembantu piutang dapat meningkatkan efektivitas pengendalian atas piutang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Seno Aji Cahyono (2005) yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Resiko Bisnis dan Kinerja Perusahaan ditunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap keseluruhan resiko bisnis. Artinya dengan melakukan pengendalian intern yang memadai maka resiko bisnis dapat semakin diperkecil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kania Nurcholisah (2008) yang berjudul Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Rasio Perputaran Piutang Pembiayaan Konsumen Dan Rasio Likuiditas ditunjukkan bahwa seluruh indikator pengendalian internal berpengaruh terhadap rasio perputaran piutang pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pengendalian intern yang memadai, dapat mengurangi jumlah piutang tak tertagih.

2.2 Kerangka Pemikiran

Setiap perusahaan mempunyai maksud dan tujuan agar dapat mencapai laba yang optimal. Dalam mencapai tujuan tersebut tentunya ada peran pengendalian intern yang diterapkan melalui proses manajemen.

Sementara Menurut Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) dalam Cangemi (2003;69) memberikan definisi dari pengendalian intern adalah:

“Internal control is a process, affected by an entity’s board of directors, management and other personal, designed to provide reasonable assurance regarding to the achievement of objectives in the following categories: (1)the effectiveness and efficiency of operations, (2)the reliability of financial reporting and (3) the compliance with applicable law and regulations”

Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses dan aktivitas. Dari pernyataan tersebut, dijelaskan bahwa

pengendalian intern adalah suatu proses dan aktivitas operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari proses manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Pengendalian intern merupakan bagian integral dan proses manajemen. Karena konsep dasar dari pengendalian intern meliputi : (1) berbagai kegiatan, (2) dipengaruhi oleh manusia, (3) diharapkan dapat mencapai tujuan (Arens 2000:292).

Konsep-konsep yang terkandung dalam definisi di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian intern adalah suatu proses. Ini berarti bahwa pengendalian intern merupakan cara untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian intern terdiri dari serangkaian tindakan yang melekat dan terintegrasi dalam infrastruktur satuan usaha.
2. Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari buku pedoman kebijakan dan formulir-formulir, tetapi juga orang-orang pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi, termasuk dewan komisaris, manajemen, seta personil lainnya.
3. Pengendalian Intern hanya diharapkan memberikan keyakinan memadai bukannya keyakinan penuh, bagi manajemen dan dewan komisaris satuan usaha karena adanya kelemahan-kelemahan bawaan yang melekat pada seluruh sistem Pengendalian Intern dan perlunya mempertimbangkan biaya dan manfaat yang bersangkutan dengan penetapan pengendalian tersebut.

Meskipun terdapat beberapa tujuan, kategori umum dari pengendalian intern menurut sawyer (2005:131) adalah:

1. Tujuan Operasional.

Hal ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas termasuk kinerja dan tujuan profitabilitas dan pengamanan sumber daya terhadap kerugian. Tujuan-tujuan tersebut bervariasi berdasarkan pilihan manajemen mengenai struktur dan kinerja.

2. Tujuan Pelaporan keuangan.

Hal ini berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang andal termasuk pencegahan pelaporan keuangan publik yang mengandung kecurangan. Tujuan tersebut terutama diarahkan oleh persyaratan-persyaratan eksternal

3. Tujuan-tujuan ketaatan.

Tujuan ini berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku bagi entitas. Tujuan-tujuan tersebut tergantung pada faktor-faktor eksternal, seperti peraturan lingkungan, dan cenderung sama untuk semua entitas dalam beberapa kasus dan beberapa industri.

Salah satu harta yang harus dilindungi di perusahaan pembiayaan adalah pemberian kredit kepada konsumen. Salah satu cara atau upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan pengendalian intern. Keberadaan pengendalian intern merupakan cara perusahaan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kelangsungan usahanya dengan melindungi harta perusahaan.

Masalah Pengendalian Internal prosedur pemberian kredit dan efisiensi pemberian kredit telah didukung oleh perumusan masalah dan didekati oleh latar belakang penelitian yang menunjukkan pengaruh Pengendalian Internal terhadap efektivitas pengelolaan pemberian kredit.

Selanjutnya untuk dapat lebih mengerti tentang Pengendalian Intern dan efisiensi pemberian kredit maka harus didekati secara integral dengan pendekatan yang sesuai dengan landasan faktual dan teori. Pengertian kredit pembiayaan adalah tagihan yang muncul karena adanya transaksi pembiayaan untuk barang-barang konsumsi yang dilakukan secara kredit.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa terhadap kredit pembiayaan konsumen perlu dilakukan pengendalian intern atas pengelolaan kredit tersebut,

hal ini karena kredit pembiayaan konsumen diberikan atas dasar kepercayaan dimana keberadaannya menimbulkan resiko, yaitu munculnya kemungkinan kredit pembiayaan konsumen tidak dapat ditagih oleh perusahaan, sehingga pada akhirnya menimbulkan kerugian perusahaan.

Proses penerimaan kredit ini merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang termasuk dalam siklus pendapatan yang sangat memerlukan adanya pengendalian intern.

Berdasarkan pernyataan tersebut, pengendalian intern terdiri dari dua aktivitas kontrol yaitu pengendalian akuntansi dan pengendalian administrasi. Keduanya dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: pengendalian akuntansi adalah pengendalian yang meliputi pengamanan terhadap kekayaan perusahaan sehingga diperlukannya catatan akuntansi. Umumnya meliputi persetujuan pemisahan antara fungsi operasional penyimpanan dan pencatatan serta pengawasan fisik terhadap harta kekayaan perusahaan. Pengendalian administrasi adalah pengendalian meliputi peningkatan efisiensi usaha dan mendorong kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan. Pada umumnya tidak langsung berhubungan dengan pencatatan akuntansi, misalnya analisis statistik, studi, waktu gerak, program pelatihan karyawan dan pengendalian mutu.

Pengendalian yang dibentuk, disusun serta dilakukan dalam suatu unit usaha dilakukan untuk tujuan menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian data akuntansi disebut tujuan pengendalian intern akuntansi. Sedangkan pengendalian yang dilakukan untuk tujuan usaha ketiga dan keempat disebut dengan pengendalian intern operasional atau administrasi. Dengan dipenuhinya

unsur-unsur pengendalian intern, maka ke empat tujuan tersebut dapat tercapai, baik tujuan akuntansi maupun operasional.

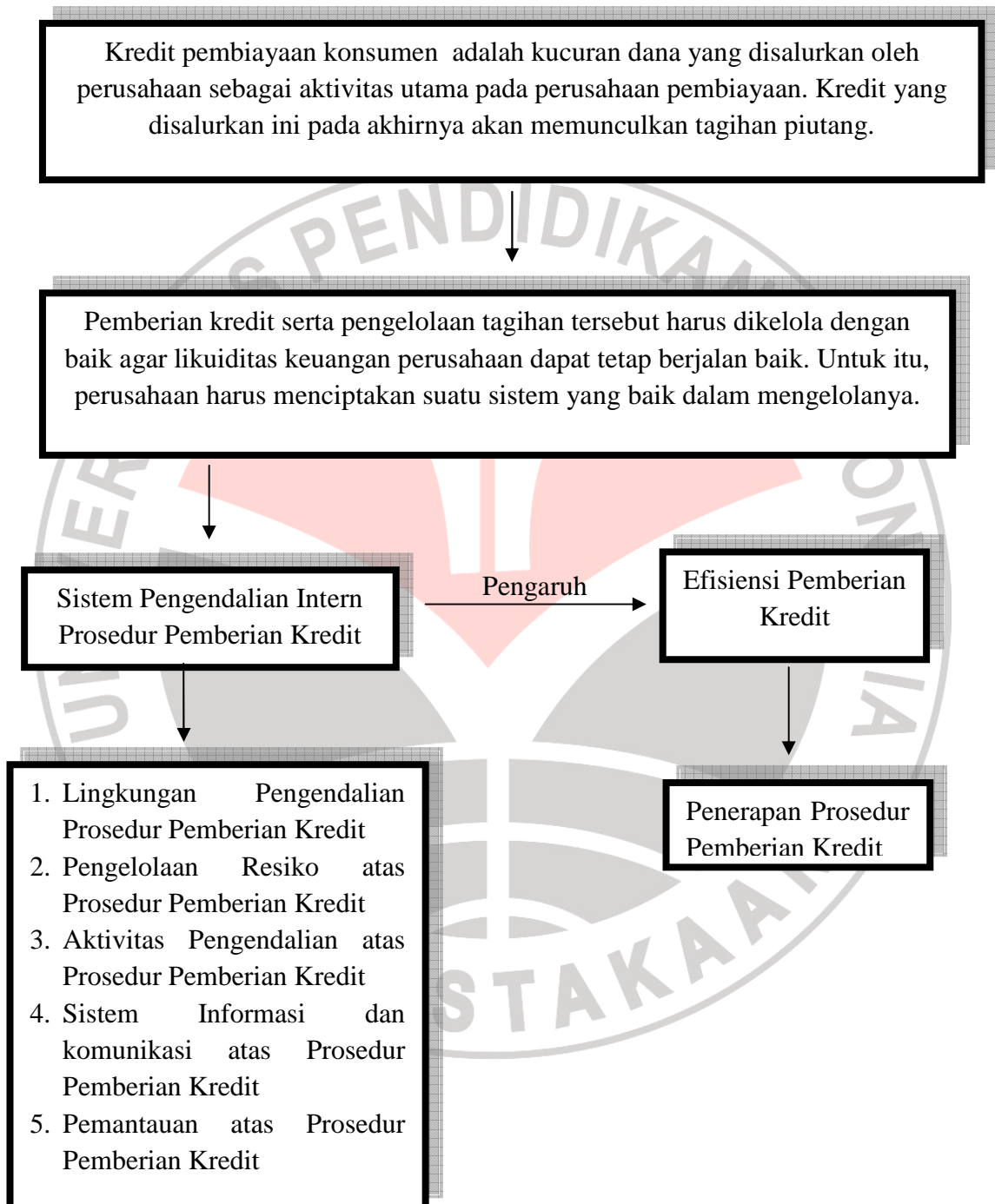
Penelitian ini dilakukan dengan lebih menekankan pada aktivitas pengendalian akuntansi. Pengelolaan dalam pemberian kredit merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan pembiayaan. Hal ini disebabkan karena kredit pembiayaan merupakan sumber utama penghasilan bagi pihak leasing.

Pengelolaan utang yang baik akan menciptakan perputaran piutang yang baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan tersebut. Tingkat perputaran piutang ini juga menggambarkan tingkat likuiditas perusahaan tersebut yang dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan.

Keberadaan utang ini yang pada akhirnya akan menjadi piutang kepada nasabah merupakan harta bagi perusahaan pembiayaan sehingga perlu dijaga keberadaan dan likuiditasnya. Perusahaan harus menjaganya agar tidak terjadi piutang tidak tertagih (*bad debt*) yang berlebihan. Karena begitu pentingnya pengelolaan utang yang berasal dari pemberian kredit kepada masyarakat, maka diperlukanlah pengendalian intern prosedur pemberian kredit guna mencegah terjadinya kehilangan harta milik perusahaan yang diakibatkan oleh kurangnya pengelolaan pemberian kredit. Pengendalian intern tersebut disusun untuk menciptakan efisiensi pemberian kredit.

Untuk lebih memudahkan dalam mengerti inti masalah dalam penelitian ini, maka disajikan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Sebelum menjelaskan hipotesis yang diambil berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian dari hipotesis.

Secara statistik, hipotesis dapat diartikan sebagai “Pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian (statistik)”. (Sugiyono, 2004:156).

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2002:64) “Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.”

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut pengendalian intern prosedur pemberian kredit memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi pemberian kredit pada perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia yang terdapat di Kota Bandung.